

14. URUSAN STATISTIK

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Statistik pada tahun 2018 meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Pemerintahan Setda.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp512.790.000,00** atau **0,024 %** dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00. Alokasi untuk urusan Statistik dapat terealisasi sebesar **Rp451.936.445,00** atau 88,13%. Program dan alokasi anggaran Urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.14. 1
Alokasi Program Anggaran Urusan Statistik Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung			
1	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik	512.790.000,00	451.936.445,00	88,13
B	Belanja Tidak langsung	-	-	
	Jumlah total	512.790.000,00	451.936.445,00	88,13

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo diolah, 2018

b. Program dan Kegiatan**1). Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah**

Keberhasilan perencanaan pembangunan dimulai dari penggunaan data dan informasi yang benar dan akurat. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan, Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi pada pelaksanaan statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan statistik sektoral, maka pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Penyusunan data/buku Statistik Daerah, Penyusunan data/buku Statistik Sektoral, dan Pengembangan Sistem Data Primer Berbasis Desa. Penyusunan data/ buku Statistik Daerah bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai macam data statistik yang dapat digunakan untuk dasar penentuan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Penyusunan data statistik sektoral berisi tentang pelatihan dan workshop tentang kegiatan statistik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik Daerah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Organisasi Perangkat Daerah memahami definisi dan manfaat tentang kegiatan statistik sektoral. Buku Statistik Daerah memuat informasi tentang pencapaian status sosial ekonomi meliputi Pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penduduk, ketenagakerjaan, transportasi dan telekomunikasi, agama dan sosial, kemiskinan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Inflasi, PDRB, (Pendapatan Daerah Regional Bruto), statistik akomodasi dan keuangan daerah. Adapun sumber data penyusunan Statistik Daerah berasal dari kompilasi data instansi vertikal dan perangkat daerah, buku "Wonosobo Dalam Angka Tahun 2018", dan data dari aplikasi SIPD (Sistem informasi Pembangunan Daerah) serta berbagai survei yang dilakukan pada tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui kegiatan Pengembangan sistem data primer berbasis desa telah melakukan pelatihan dan update open data yang terintegrasi dengan provinsi dan pusat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi manajemen data dan forum data daerah yang beranggotakan unsur-unsur perangkat daerah, BPS, serta dan unsur pemerintahan lainnya. Diharapkan melalui sosialisasi tentang manajemen data ke perangkat daerah, semua data dapat terhubung, dimanfaatkan oleh semua pihak perguruan tinggi, dunia usaha serta pengguna data lainnya dan data diakses di <http://data.wonosobokab.go.id>). Untuk memperkuat pengembangan sistem data primer juga telah dilaksanakan pelatihan pembuatan website desa dan kelurahan serta pendataan jaringan kecamatan. Tahapan awal yang dibangun dalam Pengembangan Satu Data Pembangunan dititikberatkan pada kesiapan jaringan, infrastruktur dan kesiapan sumberdaya manusianya.

Guna meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Pengembangan Sistem Informasi Desa. Untuk mendukung pengembangan sistem ini telah diadakan Bimtek Penyusunan RAPBDesa TA. 2019 melalui Aplikasi SID Mitra Desa pada 4 - 5 Desember 2018 dengan melibatkan Bagian Pemerintahan, INFEST, TIK Dinas Kominfo, 15 Kecamatan dan 236 Admin Desa. Dalam kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Wonosobo, Infest telah mengembangkan sistem informasi desa (yang salah satu fiturnya memuat pengelolaan keuangan desa) yang digunakan oleh seluruh desa di Wonosobo (236 desa). Aplikasi Mitra Desa ini sudah dikenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada seluruh desa di Kabupaten

IV.C.14. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

Wonosobo sejak tahun 2016. Aplikasi ini telah dihubungkan dengan middleware (<http://datadesa.wonosobokab.go.id>) yang memungkinkan pengintegrasian data dari desa (Aplikasi Mitra Desa) sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat secara langsung mengawasi kinerja keuangan desa secara “real time”. Seluruh desa di Kabupaten Wonosobo sekarang telah mengelola keuangan desa secara digital. Hal terpenting dari adanya sistem keuangan desa adalah keterbukaan akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan keuangan desa sehingga masyarakat punya dapat secara langsung mengawasi proses perencanaan dan penganggaran di desanya.

Selain dukungan dana dari internal kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat, Pengembangan Sistem Informasi Desa juga didukung oleh Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kegiatan Workshop Optimalisasi Sistem Informasi Desa dalam upaya peningkatan layanan informasi publik di desa pada 23 - 24 Oktober 2018 yang diikuti oleh Bagian Pemerintahan, Dinas Kominfo Kab. Wonosobo, Jurnalis, Creative, Pendamping Desa, dan 120 orang perwakilan desa. Pemerintah kabupaten Wonosobo berharap melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa dapat meningkatkan upaya perbaikan layanan informasi publik kepada masyarakat di desa guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.C.14. 2

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian(%)	Status Capaian	
1	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	buah	1	5	3	60,00	△ △ △ △	5
2	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	%	100	25	100	400,00	0	100
3	Persentase Publikasi data/kajian wajib yang diupdate	%		80	100	125,00	0	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $\geq 80\%$ - 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja urusan statistik tahun 2018 yang telah tercapai ada 2 indikator yaitu indikator persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS dan indikator persentase Publikasi data/ kajian wajib yang diupdate. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyusun Buku Indikator Statistik Makro Pembangunan Daerah, Statistik Sektor dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Ketiga dokumen tersebut merupakan produk administrasi yang disusun dan diakui oleh BPS sebagai salah satu acuan data statistik di tingkat kabupaten. Sedangkan publikasi data/ kajian yang telah diupdate Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 antara lain : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Statistik Makro Pembangunan Daerah, Statistik Sektor, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, dan Profil Kependudukan.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan Statistik, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.14. 3**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Statistik**

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (<i>up to date</i>) untuk proses perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak <i>up to date</i> .	▪ Perlunya mendorong kesamaan paradigma seluruh aparat Pemerintah Daerah sebagai eksekutor pembangunan tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan. ▪ Setiap Perangkat Daerah harus mempunyai database yang <i>up to date</i>, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya. Selain itu perlu dibangun kemudahan pertukaran data antar perangkat daerah serta memberikan efisiensi pemanfaatan dana dan waktu dalam proses pelaksanaan monitoring maupun evaluasi kegiatan dan juga bermanfaat bagi publik ▪ Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar <i>input</i> untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

IV.C.14. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik**

No	Permasalahan	Solusi
2.	Tingkat keterisian data masih tergolong sedang disebabkan oleh beragam persepsi masing-masing Perangkat Daerah terhadap pentingnya data dan beragamnya instrumen pengumpulan data	▪ Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (<i>data base</i>) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (<i>up to date</i>). Kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terus ditingkatkan. Namun, sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah juga sebaiknya menghimpun dan menginventarisir sendiri seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan. ▪ Perlunya membangun “One Data One Map” di Kabupaten Wonosobo dengan membangun simpul jaringan di kabupaten dengan menggunakan basis data yang sama dan terintegrasi yang merujuk pada referensi yang sama dengan pengelolaan terpadu dan selaras. Dengan adanya kebijakan “One Data One Map ”maka perlu segera dibentuk kelembagaan daerah dalam suatu sistem jaringan berbasis data spasial, diberikannya kemudahan akses antar perangkat daerah dalam proses perencanaan, monitoring maupun evaluasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, pengurangan adanya duplikasi informasi maupun kegiatan sehingga terbentuk data yang seragam dan standar, serta terhindar dari keraguan dalam pemanfaatan data spasial, dibangunnya satu referensi peta dasar yang sama pada skala tertentu. ▪ BPS sebagai Pembina data, Bappeda selaku koordinator data, Dinas Kominfo sebagai Walidata dan OPD sebagai Produsen data, saling berkerjasama untuk menuntukan data apasaja yang harus ada/disajikan dalam aplikasi data wonosobo, sejauh ini kominfo sudah mempunyai aplikasi data tersebut. ▪ Perlu adanya kesadaran dari perangkat Daerah untuk mengupload data dan mengupdate data baik data statistik dasar, statistik sektoral, statistik khusus dan informasi geospasial tematik .
3.	Belum adanya data pendukung/ metadata pada data	Pengembangan sistem metadata yang melekat pada data, sehingga pengguna data dapat sekaligus akses data berikut metadatanya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan-perubahan yang terjadi atas data tertentu karena perlakuan metodologis dan perubahan yang dilakukan terdokumentasi dalam metadata data tersebut.